BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

A. Makna Radikalisme Bagi Front Pembela Islam (FPI) Bandung Raya (Studi Fenomenologi Mengenai Makna Radikalisme Bagi Front Pembela Islam (FPI) Bandung Raya)

Skripsi **Eko Aditiya (41808862),** 2013. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia Bandung, dengan Dr. Drs. Ali Syamsyuddin Amin, S.Ag., M.Si sebagai pembimbing. Penelitian ini berjudul "Makna Radikalisme Bagi Front Pembela Islam (FPI) Bandung Raya (Studi Fenomenologi Mengenai Makna Radikalisme Bagi Front Pembela Islam (FPI) Bandung Raya). Pendekatan penelitian Kualitatif dengan menggunakan studi fenomenologi, dengan subjek penelitian adalah Anggota FPI dengan teknik *purposive sampling.* Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai agama yang dipahami oleh anggota FPI Bandung Raya, untuk mengetahui motif anggota FPI Bandung Raya dalam memaknai radikalisme, untuk mengetahui pengalaman bagi anggota FPI Bandung Raya selama menjadi anggota.

Hasil dari penelitian makna radikalisme bagi anggota FPI Bandung Raya adalah merupakan bentuk menegakkan dan membela agama Allah. Islam yang mereka yakini adalah islam yang sempurna, baik dan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Anggota FPI akan membela

islam jika terdapat ancaman dari siapapun, dan bahkan rela mengorbankan nyawa demi membela agama yang mereka yakini.

B. Konstruksi Makna Sosialita Bagi Kalangan Sosialita di Kota Bandung

Skripsi Citra Abadi (41809152) 2013. Jurusan Ilmu Komunikasi , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan Dr.Oji Kurniadi sebagai pembimbing. Penelitian ini berjudul "Konstruksi Makna Sosialita Bagi Kalangan Sosialita di Kota Bandung". Pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi fenomenologi, dengan subjek penelitian adalah para sosialita di kota Bandung dengan teknik *purposive sampling*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai social yang digunakan oleh kalangan sosialita di Kota Bandung, untuk mengetahui motif menjadi sosialita bagi kalangan sosialita di Kota Bandung, untuk mengetahui pesan artifaktual tentang makna sosialita bagi kalangan sosialita di Kota Bandung, dan untuk mengetahui pengalaman menjadi sosialita bagi kalangan sosialita di Kota Bandung.

Kesimpulan penelitian adalah konstruksi makna bagi kalangan sosialita saat ini didasari oleh nilai yang mereka tentukan secara subjektif. Jadi makna sosialita diartikan secara berbeda oleh setiap individu. Secara garis besar makna sosialita seet ini mengalami pergeseran. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman yang terbatas.

C. Konstruksi Makna Metode Active dan Fun Oleh Pengajar Di Sekolah Alam Bandung (Studi Fenomenologi Tentang Konstruksi Makna Metode *Active* dan *Fun* Oleh Pengajar Di Sekolah Alam Bandung)

Skripsi **Nuryanita Rahmat (210110077040),** 2011. Jurusan Ilmu Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, dengan Drs. H. Iriana Bakti, M.Si sebagai pembimbing utama dan Heru Ryanto Budiana, S.Ag., M.Si sebagai pembimbing pendamping. Penelitian ini berjudul "Konstruksi Makna Metode *Active* dan *Fun* Oleh Pengajar Di Sekolah Alam Bandung (Studi Fenomenologi Tentang Konstruksi Makna Metode *Active* dan *Fun* Oleh Pengajar Di Sekolah Alam Bandung)". Pendekatan penelitian Kualitatif dengan menggunakan studi fenomenologi, dengan subjek penelitian adalah pengajar di sekolah alam Bandung dengan teknik *purposive sampling.* Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motif Metode *Active* dan *Fun* oleh pengajar di Sekolah Alam Bandung, untuk mengetahui makna pengajar dalam melaksanakan Metode *Active* dan *Fun* di Sekolah Alam Bandung, dan untuk mengetahui pengalaman pengajar dalam melaksnakan Metode *Active* dan *Fun* di Sekolah Alam Bandung.

Hasil dari penelitian pengajar di Sekolah Alam Bandung adalah pengajar dalam memaknai Metode *Active* dan *Fun,* terdapat beberapa hal yang berkaitan yaitu mengenai pemahamannya itu dapat mengadaptasi

pembelajaran kepada peserta didiknya dengan lebih bermakna yang bermunculan berupa ide dan gagasan yang actual, autentik dan relevan, serta membangun pemahaman itu dengan pengalaman, dan hal itu pun dituangkan dalam sebuah perasaan dan apresiasi seorang pengajar dalam melaksanakan Metode *Active* dan *Fun* yang dimaknai melalui ekspresi wajah yang timbul scara natural serta dalam menyampaikan pesannya pun pengajar harus mempunyai acuan pedoman materi untuk dapat tercapainya Metode *Active* dan *Fun,* dan itu pun tidak terlepas dari peranan seorang pengajar yang memeberikan keteladanan, kedewasaan serta wawasan pengajar yang inspiratif. Hal ini sangat terpengaruh terhadap tindakan para pengajar jika tidak bisa melaksanakan metode dan tindakan tersebut itu proses belajar mengajar yang baik dapat menciptakan situasi yang memungkinkan peserta sisik belajar, sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajar, untuk dapat menciptakan situasi yang nyaman dan menarik minat peserta didik dalam belajar.

2.2 TINJAUAN PUSTAKA

2.2.1 Tinjauan Tentang Komunikasi

Istilah komunikasi memang sudah menjadi bagian keseharian kehidupan manusia, bahkan dalam kehidupan hewan pun terjadi komunikasi sebagaimana sejumlah hasil penelitian yang mengarahkan pada lahirnya komunikasi hewani.

Inti komunikasi adalah manusia. Ketika manusia ada, semua lini kehidupan manusia tersebut adalah komunikasi. Dalam konteks inilah, manusia dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna karena dapat melahirkan komunikasi. Semua hal dapat dipersepsika sebagai komunikasi jika manusia memersepsikan sebagai komunikasi sehingga persepsi komunikasi ini selalu mengikuti aturan yang dibuat manusia.

A. Pengertian Komunikasi

Kata komunikasi atau *communication* secara etimologis berkaitan dengan dua kata lainnya *communion* dan *community* berasal dari bahasa Latin *communcare* yang berarti *to make common*—membuat sesuatu menjadi bersama-sama atau *to share*—membagi yang artiannya diperluas menjadi misalnya, komunikasi adalah proses atau tindakan untuk mengalihkan pesan dari suatu sumber kepada penerima melalui saluran dalam situasi adanya gangguan dan interferensi. Ada pula yang mengelaborasi definisi ini menjadi, komunikasi adalah transmisi pesan yang bertujuan untuk memperoleh makna perubahan

tertentu. Komunikasi sebagai proses dan tindakan merupakan konsep dari kata "berkomunikasi" atau *communicate* juga berasal dari kata *common* yang artinya membagi, mempertukarkan, mengirimkan, mengalihkan, berbicara, isyarat, menulis, mendayagunakan, menghubungkan *(to share, exchange, send along, transmit, talk, gesture, write, put in use, relate).* (Weekley, 1967: De Vito, 1986).

Definisi dan pengertian komunikasi juga banyak dijelaskan oleh beberapa ahli komunikasi. Menurut Ruben & Stewart (1998):

> Komunikasi meliputi respons terhadap pesan yang diterima lalu menciptakan pesan baru, karena setiap orang berinteraksi dengan orang lain melalui proses penciptaan dan interpretasi pesan yang dikemas dalam bentuk simbol atau kumpulan simbol bermakna yang sangat berguna. (Alo Liliweri, 2011:35)

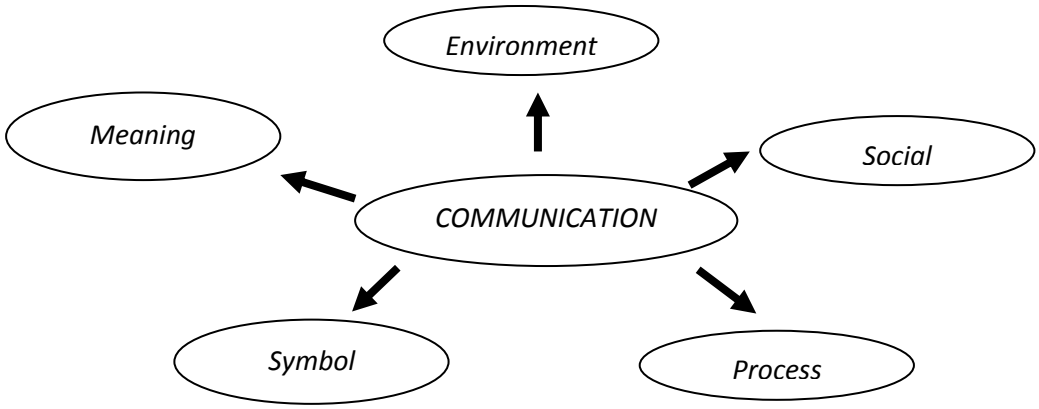
Pendapat lain tentang komunikasi menurut Santoso Santropoetro (1987:7):

> Esensinya adalah kesamaan pengertian di antara mereka yang berkomunikasi. Dalam kegiatannya, suatu komunikasi berlangsung melalui suatu proses, yaitu jalan dan urutan kegiatan sehingga terjadi/timbul pengertian tentang suatu hal di antara unsur-unsur yang saling berkomunikasi. Komunikasi adalah kegiatan manusia untuk saling memahami atau mengerti tentang suatu pesan yang dihadapi bersama antara pemberi pesan (komunikator) dan penerima pesan (komunikan), yang ada pada umumnya berakhir dengan suatu efek atau hasil. Efek komunikasi merupakan segala perubahan yang terjadi pada komunikan sebagai akibat diterimanya suatu pesan dari komunikator. (Hikmat, 2011: 3-4)

B. Proses Komunikasi

Onong Uchjana Effendy (2001:11) membagi proses komunikasi dalam dua sisi, yaitu proses komunikasi secara primer dan sekunder. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain menggunakan lambang (*symbol*) sebagai media. Sementara itu, proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain menggunakan alat dan sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media kedua. (Hikmat, 2011:7)

GAMBAR 2.1
PROSES KOMUNIKASI SOSIAL



Sumber: Baldwin, 2004

Menurut Baldwin dalam buku Komunikasi Politik proses komunikasi:

> Pertama, komunikasi merupakan proses. Kedua, proses alami dari komunikasi, salah satunya dapat dilihat dari awal hingga akhir percakapan. Ketiga, komunikasi pada hakikatnya merupakan suatu simbol. Keempat, hal yang mengaitkan antara proses dan simbol adalah makna yang

> merupakan pusat dari pendefinisian komunikasi. Kelima, lingkungan merupakan situasi/konteks dimana komunikasi terjadi. (Hikmat, 2010:10-11)

C. Fungsi Komunikasi

Dalam buku Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna (2011:136-138), fungsi-fungsi dasar komunikasi adalah:

- **Pendidikan dan Pengajaran**

Fungsi pendidikan dan pengajaran sebenarnya sudah dikenal sejak awal kehidupan manusia, kedua fungsi ini dimulai dari dalam rumah, misalnya pendidikan nilai dan norma kebudayaan, budipekerti, dan sopan santun (fungsi pengajaran) oleh orang tua dan anggota keluarga lain. Pendidikan dan pengajaran dilaksanakan melalui pendidikan formal di sekolah dan pendidikan informal/nonformal dalam masyarakat. Komunikasi menjadi sarana penyediaan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan untuk memperlancar peranan manusia dan memberikan peluang bagi orang lain untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

- **Informasi**

Kualitas kehidupan akan menjadi miskin apabila tanpa informasi. Setiap orang dan sekelompok orang membutuhkan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, informasi ini dapat diperoleh dari komunikasi lisan dan tertulis melalui

komunikasi antarpersonal, kelompok, organisasi, dan komunikasi melalui media massa. Mereka yang memiliki kekayaan informasi akan menjadi tempat bertanya bagi orang lain disekitarnya. Ada pepatah mengatakan bahwa siapa yang menguasai informasi, maka dialah yang menguasai dunia, dan komunikasi menyediakan informasi tentang keadaan dan perkembangan lingkungan sekelilingnya.

- **Hiburan**

Untuk memecahkan masalah dalam kehidupan yang rutin, maka manusia harus mengalihkan perhatiannya dari situasi *stress* ke situasi yang lebih santai dan menyenangkan. Hiburan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi semua orang. Komunikasi menyediakan hiburan yang tiada habis-habisnya misalnya melalui film, televisi, radio, drama, musik, literatur, komedi, dan permainan.

- **Diskusi**

Kehidupan kita penuh dengan pelbagai pandangan dan pendapat yang berbeda-beda, untuk menyatukan perbedaan itu dibutuhkan debat dan diskusi antarpersonal maupun dalam kelompok. Melalui diskusi dan debat akan ditemukan kesatuan pendapat sambil tetap menghargai perbedaan yang dimiliki orang lain. Komunikasi merupakan sarana yang baik bagi penyaluran

bakat untuk berdebat dan berdiskusi tentang gagasan baru yang lebih kreatif dalam membangun kehidupan bersama.

- **Persuasi**

Persuasi mendorong kita untuk terus berkomunikasi dalam rangka penyatuan pandangan yang berbeda dalam rangka pembuatan keputusan personal maupun kelompok atau organisasi. Komunikasi memungkinan para pengiriman pesan bertindak sebagai seorang persuader terhadap penerima pesan yang diharapkan akan berubah pikiran dan perilakunya.

- **Promosi Kebudayaan**

Komunikasi juga menyediakan kemungkinan atau peluang untuk memperkenalkan, menjaga, dan melestarikan tradisi budaya suatu masyarakat. Komunikasi membuat manusia dapat menyampaikan dan menumbuhkembangkan kreativitasnya dalam rangka pengembangan kebudayaan.

- **Integrasi**

Melalui komunikasi, maka sejumlah orang yang melintasi ruang dan waktu di muka bumi ini dapat diintegrasikan, artinya dengan komunikasi makin banyak orang saling mengenal dan mengetahui keadaan masing-masing. Suatu bangsa yang besar dapat diintegrasikan melalui komunikasi, misalnya komunikasi melalui media massa.

2.2.2 Tinjauan Tentang Konstruksi Makna

Makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti arti, maksud pembicara atau penulis. Menurut A.M. Moefad, "Pengerti mendefinisikan sebagai, "kemampuan total untuk mereaksi terhadap bentuk linguistik".

Konstruksi makna adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensors mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka.[6]

Ringkasnya konstruksi makna adalah proses produksi makna melalui bahasa, konsep konstruksi makna bisa berubah. Akan selalu ada pemaknaan baru dan pandangan baru dalam konsep representasi yang sudah pernah ada. Karena makna sendiri juga tidak pernah tetap, ia selalu berada dalam posisi negosiasi yang disesuaikan dengan situasi yang baru. Ia adalah hasil praktek penandaan, praktek yang membuat sesuatu hal bermakna sesuatu. (Juliastuti, 2000)

Pembentukan makna adalah berfikir, dan setiap individu memiliki kemampuan berfikir sesuai dengan kemampuan serta kapasitas kognitif atau muatan informasi yang dimilikinya. Oleh karena itu, makna tidak akan sama atas setiap individu walaupun objek yang dihadapinya adalah sama. Pemaknaan terjadi karena cara dan proses berfikir adalah unik

[6] http://yaomiakmalia.blogspot.com/2012/11/konstruksi-makna-dan-paradigma-html 25/02/2014; 20:27WIB

pada setiap individu yang akan menghasilkan keragaman dalam pembentukan makna.[7]

- **Memahami Makna**

Upaya memahami makna, sesungguhnya merupakan salah satu masalah filsafat yang tertua dalam umur manusia. Konsep makna telah menarik perhatian disiplin komunikasi, psikologi, sosiologi, antropologi, dan linguistik. Itu sebabnya, beberapa pakar komunikasi sering menyebut kata makna ketika mereka merumuskan definisi komunikasi. Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss (1944:6), misalnya, menyatakan, "Komunikasi adalah proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih." Juga Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson (1979:3), "Komunikasi adalah proses memahami dan berbagi makna".

Selama lebih dari 2000 tahun, kata Fisher (1986), konsep makna telah memukau para filsuf dan sarjana-sarjana sosial. "Makna", ujar Spradley (1997), menyampaikan pengalaman sebagian besar umat manusia disemua masyarakat". Tetapi, "apa makna dari makna-makna itu sendiri?" "Bagaimana kata-kata dan tingkah laku serta objek-objek menjadi bermakna?" dan "Bagaimana kita menemukan makna dari berbagai hal itu?" Pertanyaan ini merupakan salah satu problem besar dalam filsafat bahasa dan semantic general.

Begitu banyak orang mengulas makna, kata Rakhmat (1994:277), sehingga makna hampir kehilangan maknanya. "Banyak di antara

[7] http://atwarbajari.wordpress.com/tag/pembentukan-makna/ 25/02/2014; 20:28 WIB

penjelasan tentang makna terlalu kabur dan spekulatif," kata Katz (1973:42). Penelitian yang dilakukan terhadap kondisi lahiriah komunikasi dan hasil usaha para ahli teknik sistem komunikasi telah memberikan sedikit pengertian kepada masalah ini, tetapi hanya sampai pada ukuran yang sangat terbatas.

Para ahli mengakui, istilah makna (*meaning*) memang merupakan kata dan istilah yang membingungkan. Dalam bukunya *The Meaning of Meaning*, Ogden dan Richard (1972:186-187) telah mengumpulkan tidak kurang dari 22 batasan mengenai makna. Bentuk makna diperhitungkan sebagai istilah, sebab bentuk ini mempunyai konsep dalam bidang ilmu tertentu, yakni dalam bidang linguistik.

Model proses makna Wendell Johnson yang dikutip oleh Sobur (2013:258) menawarkan sejumlah implikasi bagi komunikasi antar manusia, yaitu:

a. Makna ada dalam diri manusia. Makna tidak terletak pada kata-kata melainkan pada manusia. Kita menggunakan kata-kata untuk mendekati makna yang ingin kita komunikasikan. Tetapi kata-kata ini tidak secara sempurna dan lengkap menggambarkan makna yang kita maksudkan. Demikian pula, makna yang didapat pendengar dari pesan-pesan kita akan sangat berbeda dengan makna yang ingin kita gunakan untuk mereproduksi, dibenak pendengar, apa yang ada dalam benak kita. Reproduksi ini hanyalah sebuah proses parsial dan selalu bisa salah.

b. Makna berubah. Kata-kata relative statis, banyak dari kata-kata yang digunakan sejak 200-300 tahun yang lalu. Tetapi makna dari kata-kata ini terus berubah dan khususnya terjadi pada dimensi emosional dari makna.
c. Makna membutuhkan acuan. Walaupun tidak semua komunikasi mengacu pada dunia nyata, komunikasi hanya masuk akal bila mana ia mempunyai kaitan dengan dunia atau lingkungan eksternal.
d. Penyingkatan yang berlebihan akan mengubah makna. Berkaitan erat dengan gagasan bahwa makna membutuhkan acuan adalah masalah komunikasi yang timbul akibat penyingkatan yang berlebihan tanpa mengaitkannya dengan acuan yang konkret dan dapat diamati. Penyingkatan perlu dikaitkan dengan objek, kejadian dan perilaku dalam dunia nyata.
e. Makna tidak terbatas jumlahnya. Pada suatu saat tertentu, jumlah kata-kata, sesuatu bahasa terbatas, tetapi maknanya tidak terbatas. Karena itu, kebanyakan kata mempunyai banyak makna.
f. Makna dikomunikasikan hanya sebagaian. Makna yang kita peroleh dari suatu kejadian (*event*) bersifat multiaspek dan sangat kompleks, tetapi hanya sebagian saja dari makna-makna ini yang benar-benar dapat dijelaskan.

2.2.3 Tinjauan Tentang Empat Pilar

Pemikiran Taufiq Kiemas tentang Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara pertama diungkapkan saat peluncuran bukunya yang berjudul Empat Pilar untuk satu Indonesia: Visi Kebangsaan dan Pluralisme Taufiq Kiemas, di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2012.

Taufiq Kiemas mengungkapkan keyakinan bahwa Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, terutama Pancasila, merupakan rumusan cita-cita besar bangsa Indonesia. Pancasila adalah terjemahan dorongan hati manusia Indonesia ke dalam dimensi sosial-politik. Pancasila dapat pula berfungsi sebagai pedoman untuk melihat peristiwa sosial-politik, ekonomi dan kebudayaan yang terjadi di tengah masyarakat dari berbagai dimensi.

Menurut Taufiq Kiemas, mayoritas warga Negara Indonesia adalah moderat-toleran dan hanya sebagian kecil yang prilakunya ekstrem karena pembiaran oleh Negara.

Dalam bukunya itu, Taufiq Kiemas juga menggagas tentang kebangsaan atau nasionalisme yang mengusung pluralism dan toleransi yang didasarkan pada pemahamannya terhadap sejarah pergerakan kebangsaan Indonesai yang sejak awal mempersatukan pemikiran dari berbagai aliran politik di masa itu.

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan

bangsa dan Negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Melalui nilai-nilai Empat Pilar, maka diharapkan dapat mengukuhkan jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme generasi penerus bangsa untuk semakin mencintai dan berkehendak untuk membangun negeri. Empat Pilar ini akan dapat menjadi panduan yang efektif dan nyata, apabila semua pihak, segenap elemen bangsa, para penyelenggara Negara dan masyarakat konsisten mengamalkannya dalam arti yang seluas-luasnya.

Penyebutan Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Dalam hal ini, posisi Pancasila tetap ditempatkan sebagai nilai fundamental berbangsa dan bernegara.

Empat Pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia tersebut merupakan prasyarat minimal bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Setiap warga Negara Indonesia harus memiliki keyakinan, bahwa itulah prinsip-prinsip moral ke-Indonesian yang memandu tercapainya perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

2.2.3.1 Latar Belakang Pentingnya Sosialisasi Empat Pilar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pilar adalah tiang penguat, dasar, yang pokok, atau induk. Penyebutan Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Setiap pilar memikili tingkat, fungsi dan konteks yang berbeda. Pada prinsipnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara kedudukannya berada di atas tiga pilar yang lain.

Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar Negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi Negara kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi Negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan

perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, dalam Negara yang menganut paham konstitusional tidak ada satupun perilaku penyelenggara Negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan konstitusi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk Negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa. Oleh karena itu komitmen kebangsaan akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu "keniscayaan" yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa. Dalam Pasal 37 ayat (5) secara tegas menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasan hukum yang kuat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diganggu gugat.

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Negara sebagai modal untuk bersatu. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, kekuatan kita, yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang. Oleh karena itu kemajemukan itu harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati serta kita wujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Empat Pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia tersebut merupakan prasyarat minimal, disamping pilar-pilar lain, bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Setiap penyelenggara Negara dan segenap warga Negara Indonesia harus memiliki keyakinan, bahwa itulah prinsip-prinsip moral ke-Indonesian yang memandu tercapainya perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Untuk itu diperlukan adanya usaha sengaja untuk melakukan penyadaran, pengembangan dan pemberdayaan menyangkut Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara itu. Para penyelenggara Negara baik pusat maupun daerah dan segenap warga Negara Indonesia harus sama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

2.2.3.2 Kondisi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tersebut patut disyukuri dengan cara menghargai kemajemukan yang hingga saat ini tetap dapat terus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan. Semua agama turut memperkukuh integrasi nasional melalui ajaran-ajaran yang menekankan rasa adil, kasih sayang, persatuan persaudaraan, hormat menghormati, dan

kebersamaan. Selain itu, nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dimanifestasikan melalui adat istiadat juga berperan dalam mengikat hubungan batin setiap warga bangsa.

Namun, sejak terjadinya krisis *multidimensional* tahun1997, muncul ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan serta nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa. Hal itu tampak dari konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi pekerti luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan, dan sebagainya yang disebabkan oleh berbagai faktor yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri. *(Ketetapan MPR Nomor VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa).*

2.2.3.3 Peran MPR Dalam Sosialisasi Empat Pilar

Saat ini, setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedautan rakyat. MPR pun tidak lagi berwenang menetapkan Garis-Garis

Besar Daripada Haluan Negara (GBHN) serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Pada periode tahun 2009-2014, Pimpinan MPR yang diketuai oleh Sidarto Danusubroto yang menggantikan Alm. DR. (HC). Taufiq Kiemas, Wakil Ketua Hj. Melani Leimena Suharli, Drs. Hajryanto Y. Thohari, M.A, Lukman Hakim Saifuddin dan Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S membentuk Tim Kerja Sosialisasi yang anggota berjumlah 35 orang, terdiri atas unsur Fraksi-fraksi dan Kelompok Anggota DPD di MPR, bertugas membantu Pimpinan MPR dalam melakukan sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Selain itu untuk memenuhi sasaran tercapainya pemahaman konstitusi oleh seluruh warga Negara, MPR melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan sosialisasi putusan MPR.

Pemasyarakatan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dapat dilaksanakan dengan berbagai metode serta melalui praktek di lingkungan instansi-instansi di setiap tingkatan pemerintahan, perusahaan Negara dan swasta, organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan kelompok masyarakat lainnya sehingga pemasyarakatan dapat menjadi gerakan nasional dari, oleh, dan untuk setiap warga Negara Indonesia. Tanpa gerakan

nasional pemasyarakatan dan pembudayaan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, eksistensi dan peranannya dari waktu ke waktu akan memudar dan pada gilirannya akan mempengaruhi penyelenggaraan Negara.

Dengan demikian, pemasyarakatan dan pembudayaan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tidak hanya dilakukan secara teoritik, tetapi juga lebih penting secara praktik, baik oleh penyelenggara Negara maupun seluruh masyarakat Indonesia.

2.2.4 Tinjauan tentang MPR RI

Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR-RI) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi Negara dalam system kettanegaraan Indonesia. Sebelum Reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi Negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota Negara.

2.2.4.1 Sejarah MPR RI

Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yang masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik, dan adminisrasi negaranya. Landasan berpijaknya adalah ideology Pancasila yang diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri beberapa minggu sebelumnya dari penggalian serta perkembangan budaya masyarakat Indonesia dan sebuah Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pra Amandemen yang baru ditetapkan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen) tersebut mengatur berbagai macam lembaga Negara dari Lembaga Tetinggi Negara hingga Lembaga Tinggi Negara. Konsepsi penyelenggaraan Negara yang demokratis oleh lembaga-lembaga Negara tersebut sebagai perwujudan dari sila keempat yang mengedepankan psinsip demokrasi perwakilan dituangkan secara utuh didalamnya. Kehendak untuk mengejawantahkan aspirasi rakyat dalam system perwakilan, untuk petama kalinya dilontarkan oleh Bung Karno, pada pidatonya tanggal 01 Juni 1945. Muhammad yamin juga mengemukakan perlunya prinsip kerakyatan dalam konsepsi penyelenggaraan Negara. Begitu pula dengan Soepomo yang mengutarakan idenya akan Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah dengan istilah Badan Permusyawaratan. Ide ini didasari oleh prinsip kekeluargaan, dimana setiap anggota keluarga dapat memberikan pendapatnya.

Dalam panitia Perancangan Undang-Undang Dasar, Soepomo menyampaikan bahwa Badan Permusyawaratan berubah menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan anggapan bahwa majelis ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat

Indonesia, yang mana anggotanya terdiri atas seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, dan seluruh wakil golongan. Konsepsi Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah yang akhirnya ditetapkan dalam Sidang PPKI pada acara pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen).

2.2.4.2 Tugas dan Wewenang MPR

- Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

  MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anggota MPR tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  Usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota MPR. Setiap usul pengubahan diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan diubah beserta alasannya.

  Usul pengubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan kepada pimpinan MPR.

Setelah menerima usul pengubahan, pimpinan MPR memeriksa kelengkapan persyaratannya, yaitu jumlah pengusul dan pasal yang diusulkan diubah yang disertai alasan pengubahan yang paling lama dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima pimpinan MPR. Dalam pemeriksaan, pimpinan MPR mengadakan rapat dengan fraksi dan pimpinan Kelompok Anggota MPR untuk membahas kelengkapan persyaratan.

Jika usul pengubahan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, pimpinan MPR memberitahukan penolakan usul pengubahan secara tertulis kepada pihak pengusul beserta alasannya. Namun, jika pengubahan dinyatakan oleh pimpinan MPR memenuhi kelengkapan persyaratan, pimpinan MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR paling lambat 60 (enam puluh) hari. Anggota MPR menerima salinan usul pengubahan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakan sidang paripurna MPR.

Sidang Paripurna MPR dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota.

- Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum

  MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Sebelum reformasi, MPR yang merupakan lembaga tertinggi Negara memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak, namun sejak reformasi bergulir, kewenangan itu dicabut sendiri oleh MPR. Perubahan kewenangan tersebut diputuskan dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 09 November 2001, yang memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, Pasal 6A ayat (1).

- Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya

  MPR hanya dapat memeberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diusulkan oleh DPR.

  MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul. Usul DPR harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa

Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.

- Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden

  Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaukukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh oleh Wakil Presiden sampai berakhir masa jabatannya.

  Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden. Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR. Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat, Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-

sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

- Memilih Wakil Presiden

  Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

- Memilih Presiden dan Wakil Presiden

  Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

  Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas

kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

2.2.4.3 Keanggotaan

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Jumlah anggota MPR periode 2009-2014 adalah 692 orang yang terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam siding paripurna MPR. Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama, mengucapkan sumpah/janji yang dipanju oleh pimpinan MPR.

2.2.4.4 Hak dan kewajiban Anggota

- Hak Anggota

  Mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  Menentukan sikap dan pilihan dalam mengambil keputusan.

  Memilih dan dipilih.

  Imunitas.

  Protokoler.

  Keuangan dan administrasi.

- Kewajiban Anggota

  Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.

  Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.

  Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

  Melaksanakan pereanan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

2.2.4.5 Fraksi dan kelompok anggota

- Fraksi

  Fraksi adalah pengelompokan anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam menentukan perolehan kursi DPR. Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR di anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusan fraksi masing-masing.

- Kelompok anggota

  Kelompok anggota adalah pengelompokan anggota MPR yang berasal dari seluruh anggota DPD. Kelompok anggota dibentuk untuk meningkatkan optimalisasi dan efektivitas kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil daerah. Pengaturan internal Kelompok Anggota sepenuhnya menjadi urusan Kelompok Anggota.

2.2.4.6 Alat kelengkapan

Alat kelengkapan MPR terdiri atas; Pimpinana dan Panitia Ad Hoc.

- Pimpinan

  Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR.

- Panitia Ad Hoc

  Panitia Ad Hoc terdiri atas pimpinan MPR dan paling sedikit 5 % (lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan unsur DPR dan unsur DPD secara proporsional dari setiap fraksi dan Kelompok Anggota MPR.

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Di dalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut, sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian.

Teori adalah suatu pernyataan mengenai apa yang terjadi terhadap suatu fenomena yang ingin kita pahami. Teori yang berguna adalah teori yang memberikan pencerahan, serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang ada dihadapan kita. Akan tetapi perlu dijelaskan sebagai suatu arahan atau pedoman penulis untuk dapat mengungkap fenomena agar lebih terfokus. Sekumpulan teori ini dikembangkan sejalan dengan penelitian itu berlangsung. Hal tersebut didasarkan pada suatu tradisi bahwa fokus atau masalah penelitian diharapkan berkembang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Penelitian kualitatif mementingkan perspektif emik, dan bergerak dari fakta, informasi atau peristiwa menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi (apakah itu konsep ataukah teori) serta bukan sebaliknya dari teori atau konsep ke data atau informasi.

Empat fungsi teori:

1. Menjelaskan atau memberi tafsir baru terhadap fenomena atau data.
2. Memprediksi sesuatu berdasarkan pengamatan.
3. Menghubungkan satu studi dengan studi lainnya.

4. Menyediakan kerangka yang lebih terarah dari temuan dan pengamatan bagi kita dan orang lain.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan menggunakan Teori Konstruksi Realitas Peter L Berger sebagai penaduan penelitian untuk lebih menggali secara mendalam bagaimana konstruksi sebuah makna.

2.3.1 Konstruksi Realitas Sosial

Konstruksi sosial (*social construction*) merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Menurut Berger, realitas social eksis dengan sendirinya dan struktur dunia social bergantung pada manusia yang menjadi subjeknya (Kuswarno, 2009:111).

Berger memiliki kecenderungan untuk menggabungkan dua perspektif yang berbeda, yaitu perspektif fungsional dan interaksi simbolik, dengan mengatakan bahwa realitas sosial secara objektif memang ada (perpektif fungsionalis), namun maknanya berasal dari dan oleh hubungan subjektif individu dengan dunia objektif (perspektif interaksionalis simbolik) (Poloma dalam Kuswarno, 2000:299).

Didalam penelitian ini peneliti berusaha mengungkapkan makna Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Pemaknaan yang diberikan oleh anggota MPR RI periode 2009-2014 tentang Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (subjektif), dipahami sebagai tolak

ukur dalam mengaplikasikan apa yang menjadi nilai dan pandangan terhadap makna Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang dipahami oleh anggota MPR RI periode 2009-2014 (objektif).

Dalam studinya, Bungin, dalam buku filsafat komunikasi (2013:71) antara lain, memaparkan:

> Ketika Berger dan Luckmann menjelaskan mengenai konstruksi sosial maka konstruksi sosial yang dimaksud adalah sebuah proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang terjadi antara individu di dalam masyarakat. Ketiga proses di atas terjadi secara stimultan membentuk dialektika, serta menghasilkan realitas sosial berupa pengetahuan umum, konsep, kesadaran umum, dan wacana publik. Dalam pandangan Berger dan Luckmann, konstruksi sosial itu ialah realitas sosial yang berupa realitas objektif, subjektif, maupun simbolis. Sedangkan materi realitas sosial itu adalah konsep-konsep kesadaran umum dan wacana publik (Bungin, 2008:212).

Berger menemukan konsep untuk menghubungkan antara yang subjektif dan objektif melalui konsep dialektika, yang dikenal dengan internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi.

1. Internalisasi ialah individu mengidentifikasi diri ditengah lembaga-lembaga social atau organisasi sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya. "*Man is a social product*".
2. Eksternalisasi ialah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. "*Society is a human product*".
3. Objektivasi ialah interaksi sosial dalam dunia interubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. "*Society is an objective reality".*

Melalui proses internalisasi atau sosialisasi inilah orang menjadi anggota masyarakat. Dalam tradisi psikologi sosial, Berger dan Luckmann (1966) sebagaimana dikutip oleh Margaret Poloma menguraikan:

> Sosialisasi primer sebagai sosialisasi awal yang dialami individu dimasa kecil, disaat mana dia diperkenalkan pada dunia sosial obyektif. Individu berhadapan dengan orang lain yang cukup berpengaruh (orang tua atau pengganti orang tua), dan bertanggung jawab terhadap sosialisasi anak. Batasan realitas yang berasal dari orang lain yang cukup berpengaruh itu dianggap oleh si anak sebagai realitas obyektif. (Margaret, 1979:304)

Karena realitas yang ada tidak mungkin diserap dengan sempurna maka si anak akan menginternalisir penafsiran terhadap realitas tersebut. Setiap orang memiliki versi realitas yang dianggapnya sebagai cermin dari dunia obyektif. Dengan demikian Berger dan Luckmann menekankan eksistensi realitas sosial berganda. Berger dan Luckmann (1966) menyatakan:

> Realitas objektif dapat langsung diterjemahkan ke dalam realitas subyektif, dan begitu pula sebaliknya. Menurut mereka realitas subyektif dan obyektif memang bersesuaian satu sama lain, tetapi selalu ada realitas yang "lebih" obyektif yang dapat diinternalisir oleh seorang individu saja (Margaret, 1979:305)

Yang dapat kita simpulkan bahwa seorang individu memiliki realitas "subyektif" yang tentunya berbeda dengan individu lainnya walau sama-sama memahami realitas obyektif yang sama.

Eksternalisasi, merupakan proses dimana semua manusia yang mengalami sosialisasi yang tidak sempurna dan secara bersama-sama membentuk realitas baru dan individu menyesuaikan dirinya didalam konteks sosial.

Pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik-karekteristik yang spesifik. Kenyataan sosial adalah hasil (eksternalisasi), internalisasi dan objekvikasi manusia terhadap pengetahuan – dalam kehidupan sehari-hari atau secara sederhana, eksternalisasi dipengaruhi oleh *stock of knowledge* yang dimilikinya. Cadangan sosial pengetahuan adalah akumulasi dari *common sense knowledge*.

Terbetuknya realitas obyektif bisa melalui legitimasi. Legitimasi merupakan obyektivikasi makna, karena selain menyangkut penjelasan juga mencangkup nilai-nilai. Legitimasi berfungsi untuk membuat obyektifikasi yang sudah melembaga menjadi masuk akal secara subyektif.

Menurut Peter L. Berger dan Luckmann (1979) disisi sebaliknya, masyarakat, yaitu individu-individu sebagai realitas subyektif menafsirkan realitas obyektif melalui proses internalisasi. Internalisasi berlangsung seumur hidup seorang individu dengan melakukan sosialisasi. Individu berupaya memahami definisi "realitas obyektif"; namun lebih dari itu, individu turut

mengkonstruksi pengetahuan bersama. Jadi individu adalah aktor yang aktif sebagai pembentuk, pemelihara, sekaligus perubahan masyarakat.[8]

Istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.[9]

2.3.2 Teori Konstruksi Realitas secara Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

Salah seorang mahasiswa Schutz yang tertarik dengan pembahasan tentang konstruksi realitas sosial adalah Peter L. Berger. Berger mampu mengembangkan model teoretis lain mengenai bagaimana dunia sosial terbentuk. Dia menganggap realitas sosial eksis dengan sendirinya dan struktur dunia sosial bergantung pada manusia yang menjadi subjeknya. Dengan demikian, dia berpendapat bahwa realitas sosial secara objektif memang ada (seperti pada perspektif fungsional), tetapi maknanya berasal dari dan oleh hubungan subjektif (individu) dengan dunia objektif (suatu perspektif interaksionalis).

---

[8] http://kuliahsosiologi.blogspot.com/2011/05/masyarakat-sebagai-realitas-objektif.html 19/03/2014 ; 22.34 WIB

[9] Ibid
Margaret M. Poloma, 2000:301

Bersama dengan Thomas Luckmann, Berger menuangkan pikiran tentang konstruksi sosial dalam buku berjudul *The Social Construction of Reality*. Berger dan Luckmann dalam bukunya menyebutkan bahwa seseorang hidup dalam kehidupannya mengembangkan suatu perilaku yang repetitive, yang mereka sebut sebagai "kebiasaan" (*habits*). Kebiasaan ini memungkinkan seseorang mengatasi suatu situasi secara otomatis. Kebiasaan seseorang ini berguna juga untuk orang lain. Dalam situasi komunikasi interpersonal, para partisipan ("aktor" menurut Schurz) saling mengamati dan merespon kebiasaan orang lain, dan dengan cara seperti ini semua partisipan dapat mengantisipasi dan menggantungkan diri pada kebiasaan orang lain tersebut. Karena kebiasaan ini, seseorang dapat membangun komunikasi dengan orang lain yang disesuaikan dengan tipe-tipe seseorang, yang disebut sebagai pengkhasan (*typication*). Dengan berjalannya waktu, kenyataan selanjutnya, beberapa kebiasaan menjadi milik bersama seluruh anggota masyarakat, maka terbentuklah sebuah lembaga (*institution*).

Institusi memungkinkan berkembangnya suatu peranan (*roles*), atau kumpulan perilaku yang terbiasa (*habitual behavior*) dihubungkan dengan harapan-harapan individu yang terlibat. Ketika seseorang memainkan suatu peranan yang dia adopsi dari perilaku yang terbiasa, orang lain berinteraksi dengannya sebagai suatu bagian dari institusi tersebut ketimbang sebagai individu yang unik. Pada institusi tersebut

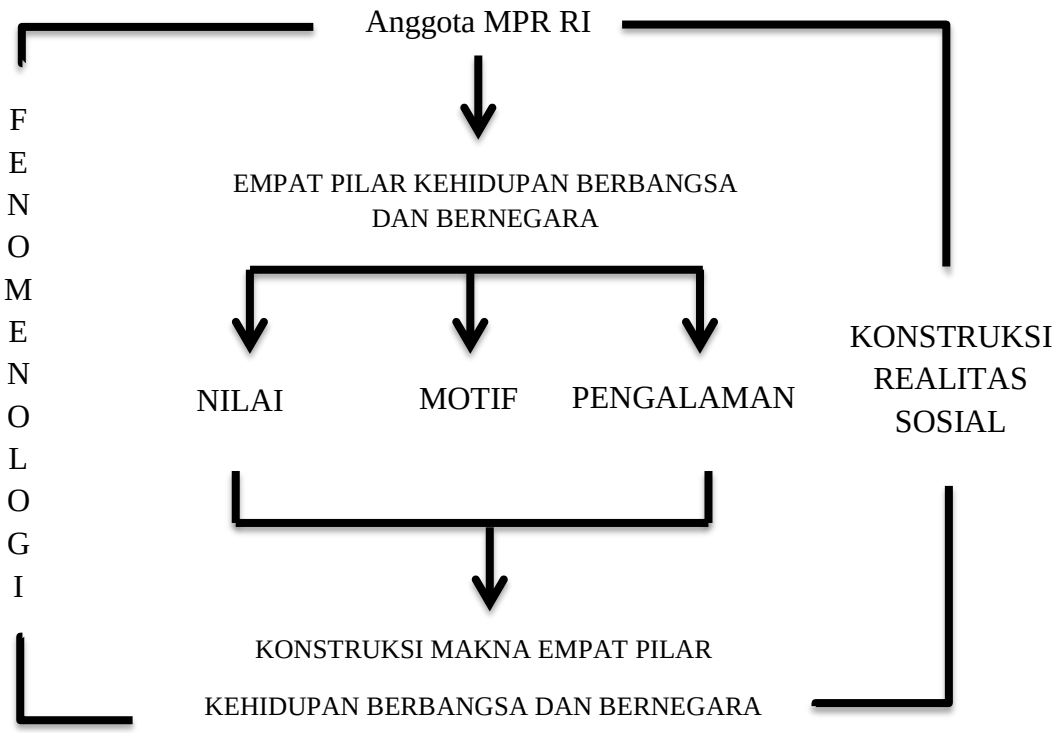
juga berkembang apa yang disebut sebagai hukum (*law*). Hukum ini yang mengatur berbagai peranan.

Oleh karena aktor telah menetapkan hukum berperilaku, maka institusi menjadi sebuah kendali sosial. Jika kendali sosial ini akan dipertahankan dalam waktu lama, maka generasi berikutnya harus diajari untuk berpartisipasi di dalam institusi oleh para orang tua mereka. Dengan demikian institusi tersebut akan terlegitimasi dan terpelihara melalui tradisi dan edukasi.

Dalam penelitian ini anggota MPR RI periode 2009-2014 akan memaknai arti dari Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, pendekatan fenomenologi, serta menggunakan teori konstruksi realitas sosial sebagai panduan dalam mengungkapkan pemaknaan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tersebut tentang nilai, motif, serta pengalaman dalam memaknai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jika diaplikasikan, proses konstruksi makna tentang Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dapat digambarkan dalam sebuah kerangka pemikiran di bawah ini:

GAMBAR 2.2

KERANGKA PEMIKIRAN



Sumber: peneliti, 2014

Anggota MPR RI adalah orang-orang pilihan sebagai elit politik yang memiliki makna tersendiri terhadap Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menghasilkan suatu makna, maka peneliti menggunakan mikro untuk mengetahui nilai, motif, dan pengalaman

untuk dapat mengkaji makna Empat Pilar kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Noronagoro dalam Setiadi, E. (2006:123) membagi hierarki nilai pada tiga:

1) **Nilai materiel**, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia;
2) **Nilai vital,** yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan aktivitas;
3) **Nilai kerohanian**, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Bagaimana anggota MPR RI memaknai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, melalui nilai material, dengan apa yang dikenakan, apa yang dimakan, dan sebagainya; nilai vital, dilihat dari latar belakang pendidikan serta pengetahuan maupun pemahaman tentang Empat Pilar itu sendiri; dan nilai kerohanian, dengan menerapkan kebenaran, perasaan, kebaikan, kepercayaan dan keyakinan.

Motif Menyangkut motif, Schutz yang membagi *account* atau motif dengan memberi identitas dua fase, dalam buku Engkus Kuswarno (2009: 167) :

- **Motif Masa Datang**: *In-order-to-motive (Um-zu-Motiv),* yang merujuk pada masa yang akan datang (motif yang bertujuan atau motif untuk)
- **Motif Masa Lalu**: Tindakan *because-motive (Weil-Motiv)* yang merujuk pada masa lalu (motif sebab atau motif karena)

Di tambahkan kategori baru dengan menyebut, **Motif Masa Kini** (motif agar atau motif supaya)

Pengalaman adalah peristiwa yang benar-benar pernah dialami. Pengungkapan pengalaman secara narasi berarti mengemukakan atau memaparkan suatu peristiwa atau pengalaman yang pernah dialami berdasarkan urutan waktu terjadinya peristiwa.[10]

Untuk mengetahui makna Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi dan mengunakan teori konstruksi realitas sosial.

[10] http://temukanpengertian..blogspot.com/2013/09/pengertian-pengalaman.html 17/03/2014; 10:24 WIB